



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke-6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Senin, 10 April 2023
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara	: Dalam rangka untuk mendapat masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN).
Ketua Rapat	: Wahyu Sanjaya, S.E.,M.M.
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E.,M.Si
Hadir Pimpinan	: 2 dari 3 orang Pimpinan BAKN DPR RI yaitu : 1. Wahyu Sanjaya, S.E.,M.M. 2. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.
Hadir Anggota	: 5 dari 9 orang Anggota BAKN DPR RI yaitu : 1. Wahyu Sanjaya, S.E.,M.M. 2. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. 3. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H. 4. H. Bachrudin Nasori, S.Si.,M.M. 5. Ahmad Najib Qodratullah, S.E.
Hadir Tamu	: 1. Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE., Kepala BPKP 2. Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak, CFE., CfrA., CA., QIA, CGCAE., ASEAN CPA., CIAE. Sekretaris Utama BPKP. 3. Salamat Simanullang, Ak., MBA, CMA.,CA.,QIA.,CGCAE., Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP 4. Iwan Taufiq Purwanto, S.E., MBA., CGCAE., CRMP., QIA., CIAE., Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum,

Keamanan, Pembangunan, Manusia, dan
Kebudayaan BPKP.

5. Raden Suhartono, S.E., M.Ak., CIAE., Deputi
Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah BPKP
6. Dr. Sally Salamah, Ak., M.Prof., Acc., CGCAE.,
QIA., CHRP., CIAE., Deputi Bidang Akuntan
Negara BPKP.
7. Agustina Arumsari, Ak., M.H., CFE., CfrA., CA.,
QIA., CGCAE., CIAE., Deputi Bidang Investigasi
BPKP.

Peserta : Tenaga Ahli BAKN DPR RI dan Sekretariat.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dibuka pada pukul 14.00 WIB, dipimpin oleh Ketua BAKN, Bapak Wahyu Sanjaya, S.E., M.M. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari ini adalah Dalam rangka untuk mendapat masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN).
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP sebagai narasumber untuk menyampaikan paparan terkait dengan tema rapat dengar pendapat yang dimaksud.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini.

II. CATATAN RAPAT/POKOK-POKOK PEMBAHASAN:

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) BAKN DPR RI Dalam rangka untuk mendapat masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN), beberapa hal yang menjadi pokok bahasan, sebagai berikut :

Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP sebagai narasumber menyampaikan paparan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yaitu :

- ✓ Tambahan PMN ke BUMN tahun 2015-2022 terlihat pada tabel berikut.



TAMBAHAN PMN KE BUMN TAHUN 2015-2022

PP Terbit	PMN Tunai			PMN Non Tunai			PMN PEN		Programas yang tidak BKPD		
	Tahun	Jumlah PP	Rp (Milyar)	Jumlah PP	Jenis Pengalihan Saham	Beli dan Lainnya	Jumlah PP	Rp (Milyar)	Jumlah PP	Rp (Milyar)	Kegiatan
2022	19	12	59.659,00	6	6	0	1	1000,00	1	1000,00	Manajemen Risiko
2021	24	13	113.558,00	8	6	2	3	26.900,00	7	33.570,00	Manajemen Risiko, Pemantauan IPP, PEN
2020	19	7	17.218,00	5	1	4	7	24.070,00	6	27.070,00	Manajemen Risiko, Pemantauan
2019	9	4	20.300,00	5	2	3	0	0	0	0	Manajemen Risiko
2018	8	1	3.600,00	7	1	6	0	0	0	0	Manajemen Risiko
2017	13	5	9.200,00	8	2	6	0	0	0	0	Manajemen Risiko
2016	41	21	60.297,00	20	8	12	0	0	7	11.000,00	Manajemen Risiko, Pemantauan
2015	47	42	52.277,31	5	3	2	0	0	12	9.770,00	Manajemen Risiko, Pemantauan
Total	180	105	336.109,31	64	23	36	11	51.970,00	36	66.340,00	

Sumber: www.mscfca.go.id diakses tanggal 31 Maret 2023 (disarikan dari masing-masing peraturan pemerintah Tambahan PMN); Sumber: BPKP

- ✓ **Permasalahan PMN antara lain sebagai berikut.**
 - Kekurangsiapan BUMN yang menerima dan PMN
 - Ketidaksiapan operasional BUMN untuk menindaklanjuti PMN yang sudah direncanakan
 - Rencana perubahan tambahan PMN belum memperoleh persetujuan dari organ BUMN
 - Rencana perubahan tambahan pmn tidak sesuai dengan RJPP dan RKAP
 - Analisis risiko atas rencana perubahan tambahan PMN tidak akurat.
 - Keterlambatan pencairan PMN
 - Rendahnya penyerapan penggunaan PMN
 - Adanya PMN yang tidak terserap
 - SPI belum melakukan audit, monitoring, dan evaluasi
 - Pelaporan tidak tepat waktu.
- ✓ **Saran perbaikan terkait PMN dan Lembaga yang berkaitan dengan PMN adalah sebagai berikut :**
 - Kepada Kementerian Keuangan; percepatan penetapan dan pencairan PMN, pemotongan usulan tambahan PMN memperhatikan sasaran yang akan dicapai, dan mengatur kebijakan pengembalian dana PMN yang tidak digunakan.

- Kepada Kemenerian BUMN; mempertajam kajian usulan tambahan PMN dan memantau dan mengevaluasi kesiapan dan operasional BUMN dalam pelaksanaan PMN.
- Kepada Direksi BUMN; melakukan kajian yang lebih akurat dan lengkap atas kebutuhan PMN, melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan PMN yang diterima dengan berlandaskan governance, risk, compliance, dan mengoptimalkan SPI untuk melakukan pemantauan dan pengawasan PMN.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 10 April 2023

**a.n. PIMPINAN
KABAGSET BAKN,**



Mardi Harjo, SE., M.Si.
NIP. 19700915 1998 03 1006